

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Ali Zainu Dana Desain, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2004, *Hasil Pemeriksaan Sementara Semester 1 Tahun Anggaran*, Sekretariat BPK RI, Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2007, *Menegakkan Tata Kelola yang Baik dengan Kemandirian, Integritas, dan Profesionalisme, untuk Mensejahterakan Kehidupan Bangsa*, Kesekretariatan BPK RI, Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan, *Mengenal Lebih Dekat BPK*, 2009, Biro Humas dan Luar Negeri BPK RI, Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 2016 *Laporan Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun Anggaran 2015/2016 Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah*, Semarang
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2017, *Standar Auditing Pemerintahan Tahun 2017*, Sekretariat Jendral BPK RI, Jakarta
- Daton Seran Fabianus, 2008, *Fungsi Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengawasan Eksternal Pemerintah Dalam Menciptakan Good Governance Di Indonesia*, UGM, Yogyakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Fahrojih Ikhwan, *Menggugat Peran DPR dan BPK dalam Reformasi Keuangan Negara, Op.Cit, hlm. 131.*

Huda Ni'matul, 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta

Manan Bagir, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) UII, Yogyakarta

Djafar Saidi, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, 2016, *Pengelolaan Keuangan Desa yang berasal dari APBN dan APBD TA. 2015/2016 (Semester I) Kabupaten Grobogan*, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Semarang.

Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta

PPT Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa BPK, 2011, *Pemeriksaan Keuangan Negara*, BPK RI, Yogyakarta.

Sadjijino, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang PRESindo, Yogyakarta

Subagyo M, 1987, *Hukum Keuangan Negara RI*, CV Rajawali, Jakarta

Sudarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung

Sujamto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Tjakranegara Soegijatno, 1992, *Hukum Tata Usaha dan Birokrasi Negara*,



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN
DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus Desa Putat, Kecamatan
Purwodadi, Kabupaten
Grobogan)**

ERLITA KUSUMA WIDIASTITI, Triyanto Suharsono, S.H.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Rineka Cipta, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari APBN, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 atas Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

D. Internet

<https://m.tempo.co/read/news/2016/08/12/173795475/anggaran-dana-desa-dipastikan-naik-hingga-rp-113-triliun>

<https://m.tempo.co/read/news/2016/08/12/173795475/anggaran-dana-desa-dipastikan-naik-hingga-rp-113-triliun> diakses pada tanggal 18 Agustus 2016 pukul 20.14

<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/manfaat-bijak-dana-desa>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul. 15.01

Karakteristik *Good Governance* Menurut UNDP,

<http://kupangblog.blogspot.com/2009/05/karakteristik-good-governance-menurut.html> diakses tanggal 20 Agustus 2016, pukul 17.06

Indikator dan Tolok Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam *Good Governance*,

<http://accountability.humanitarianforumindonesia.org/LinkClick.aspx?flticket=HfxHsYTX%3D&tabid=648&mid=1526>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 17.17